

## DAFTAR BACAAN

### **Buku**

Agusmidah, **Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Ashshofa, Burhan, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Karya, Jakarta, 2007.

Hardijan Rusli, **Hukum Ketenagakerjaan 2003**, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Hasyim, Farida, **Hukum Dagang**, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Husni, Lalu, **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, **Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum**, Buku I, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.

Kranenburg, **Perkembangan Peradilan tetang Pertanggung-Jawab Negara**, Permata, Jakarta, 1974.

Mahmud Marzuki, Peter, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Ed. IV, Cet. II, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.

Ramli, Lanny, **Hukum Ketenagakerjaan**, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.

Raharjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sembiring, Sentosa, **Hukum Dagang**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cet.III, 2008.

Soepomo, Iman, **Pengantar Hukum Perburuhan**, Djambatan, Jakarta, 1983.

Suratman, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT Indeks, Jakarta, 2010.

Sutedi, Adrian, **Hukum Perburuhan**, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Philipus M.Hardjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT Bina Ilmu, 1987.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN Tahun 2009 No. 160, TLN No. 5079

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN Tahun 2009 No. 158, TLN No. 5077.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, LN Tahun 2008 No. 139, TLN No. 4899.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN Tahun 2007 No. 58, TLN No. 4720.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN Tahun 2004 No. 35, TLN No. 4380.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN Tahun 2004 No. 34, TLN No. 4379.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, LN Tahun 2004 No. 06, TLN No. 4356.

Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN Tahun 2003 No. 39, TLN No. 4279.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan, LN Tahun 2003 No. 91, TLN No. 4309.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN Tahun 2002 No.109, TLN 4102.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Tahun 1999 No.165, TLN 3886.

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, LN Tahun 1992 No. 14, TLN No. 3468.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN Tahun 1986 No. 77, TLN No. 3344.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN Tahun 1986 No. 20, TLN No. 3327.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, LN Tahun 1984 No. 22, TLN No.3274.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, LN Tahun 1982 No. 7, TLN No. 3214.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, LN Tahun 1981 No. 39, TLN No. 3201.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, LN Tahun 1970 No. 1, TLN No. 2918.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, LN Tahun 1951 No.4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan.

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi.

### **Skripsi**

Rena Zefania Ritonga, **Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Mendapatkan Jaminan Aksesibilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007.

### **Jurnal**

Primasta, Agus S., **Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Jurus Menghindari Biaya Perkara**, Pusdiklat Laboratorium FH Universitas Islam, Yogyakarta.

### **Koran**

Kompas, "**Kabupaten Tangerang Akui Kecolongan**," Edisi 8 Mei 2013.

Jawa Pos, "**Tanpa Gaji, Kerja 18 Jam, Tak Mandi 4 Bulan**," Edisi 5 Mei 2013.

Kompas, "**Aroma Busuk Di Lebak Wangi**," Edisi 6 Mei 2013.

### **Internet**

APP/RIF, “Dianggap TKI Ilegal, Raisah Tak Dapat Bantuan Pemerintah”,  
<http://disnakertrans.bantenprov.go.id/read/article-detail/info-bptki-kota-sera/217.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2013.

BPHN PUSLITBANG,  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/ketenagakerjaan.pdf>, diakses  
 pada tanggal 21 Nopember 2013.

DDN/RUS, “PT. CKM yang sekap PRT Gak Terdaftar di Disnakertrans Tangsel”,  
<http://m.menit.tv/welcome/read/2013/10/21/24312/0/18>, diakses pada  
 tanggal 24 Oktober 2013.

Fabian Januarius Kuwado, “Tersangka Perbudakan Buruh Temperamental dan  
 Tertutup”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/05/18194471>,  
 diakses pada tanggal 28 Oktober 2013.

Fikri, “Buruh Unican “Kepung” Disnakertrans”, <http://bantenrava.com/banten-rava/serang/1633>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2013.

Joniansyah, “Omzet Pabrik Panci Rp. 400 Juta Per Bulan”,  
<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/09/064479066>, diakses pada  
 tanggal 29 Oktober 2013.

ZAK, “Kasus Perbudakan, Bos Kualu Terancam 15 Tahun Penjara”,  
<http://megapolitan.kompas.com/kasus-perbudakan-bos-kuali-terancam-15-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 27 November 2013.

“Bos Pabrik Panci Pernah Jadi Bandar Pilkadaes”,  
<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/06/064478142/Bos-Pabrik-Panci-Pernah-Jadi-Bandar-Pilkades>, diakses pada tanggal 10 Desember  
 2013.

“Buruh Pabrik Panci Dipaksa Kerja Seperti Budak”,  
<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/04/064477938>, diakses pada tanggal 20 November 2013.

“Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi”,  
<http://www.kayongutarakab.go.id/2012/index.php/dinas-daerah/dinas-sosial-tenaga-kerja-dan-transmigrasi#sthash.VPwECzH4.dpuf>, diakses tanggal 12 Desember 2013.

“Hak”, <http://kamusbahasaindonesia.org/hak>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2013.

“Izin Usaha Pabrik Panci Penyekap Buruh Dicabut”,  
<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/06/064478161>, diakses pada tanggal 20 November 2013.

“Kewajiban”, <http://kamusbahasaindonesia.org/kewajiban>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2013

“Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, diakses tanggal 10 Desember 2013

“Sehari Buruh Panci Wajib Cetak 200 Wajan”,  
<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/06/064478325>, diakses pada tanggal 20 November 2013.

“Sekap Buruh Pabrik Panci di Sepatan Digerebek”,  
<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/04/064477916>, diakses pada tanggal 20 November 2013.

“Tugas Pokok dan Fungsi”, <http://disnaker.pinrangkab.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses tanggal 12 Desember 2013.